

BAB II

PROFIL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI UZBEKISTAN

A. Profil Negara Uzbekistan

Uzbekistan adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tengah. Secara astronomis Uzbekistan terletak di 41° LU and 64° BT. Dan secara geografis, letak negara ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah kawasan Asia Tengah. Di sebelah utara berbatasan dengan Kazakshtan, di sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Turkmenistan, di sebelah selatan berbatasan dengan Afghanistan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kirgizstan dan Tajikistan.



Gambar 2.1. Peta Negara Uzbekistan

Panjang total perbatasan negara Uzbekistan adalah 6.221 kilometer, dan luas wilayah negaranya adalah $447,400 \text{ km}^2$, menjadikan negara ini sebagai negara terbesar ke-57 di dunia berdasarkan luas wilayah. Komposisi total luas tersebut terdiri dari luas daratan dan lautan, yang mana daratan

sejumlah 425,400 km² dan lautan sejumlah 22,000 km². Titik tertinggi di negara Uzbekistan ini adalah berada di ketinggian 4.643 meter, dan puncak tersebut bernama Khazret Sultan. Dari total luas wilayah yang mencapai 440 ribu kilometer persegi tersebut, sekitar $\frac{2}{3}$ nya terdiri atas dataran (dataran rendah Turan, lembah Fergana, cekungan Amu-Darya, sungai Syr-Darya dan Zarafshan beserta anak-anak sungai di Uzbekistan), dan $\frac{1}{3}$ nya lagi adalah berupa pegunungan dan perbukitan (pegunungan Tien Shan dan Gissaro-Alay).

Ibukota negara Uzbekistan adalah Tashkent. Kota ini menjadi kota dengan penduduk terbanyak di Uzbekistan. Uzbekistan dibagi menjadi sekitar 12 provinsi, satu Daerah Ibukota dan satu republik otonom. Dalam bahasa Uzbek, pembagian desentralisasi pemerintahan atau yang biasa dikenal dengan Provinsi ini disebut dengan *Viloyati* (wilayah).



Gambar 2.2. Pembagian Daerah Provinsi di Negara Uzbekistan

Tabel 2.1. Daftar Provinsi yang terdapat di Uzbekistan

Provinsi (<i>Viloyati</i>)	Ibukota	Luas (km ²)	Populasi (2008)	Nomor daerah
Daerah Ibukota Tashkent	Tashkent	335	2,352,900	1
Andijan	Andijan	4,200	2,477,900	2
Bukhara	Bukhara	39,400	1,576,800	3
Fergana	Fergana	6,800	2,997,400	4
Jizzakh	Jizzakh	20,500	1,090,000	5
Namangan	Namangan	7,900	2,196,200	6
Navoiy	Navoiy	110,800	834,100	7
Kashkadarya	Karshi	28,400	2,537,600	8
Samarkand	Samarkand	16,400	3,032,000	9
Syrdarya	Gulistan	5,100	698,100	10
Surkhandarya	Termez	20,800	2,012,600	11
Tashkent	Tashkent	15,300	2,537,500	12
Khorezm	Urgench	6,300	1,517,600	13
Republik Karakalpakstan	Nukus	160,000	1,612,300	14

Negara Uzbekistan memiliki beberapa etnis dan suku. Seperti halnya pola populasi etnis bahwa di suatu negara pasti memiliki etnis yang mayoritas, dan hal ini juga berlaku di Uzbekistan yang mana memiliki etnis yang terbesar yakni Uzbek. Adapun etnis dan suku yang ada di Uzbekistan antara lain Uzbek (81,1%), Russian (5,4%), Tajik (4,0%), Kazakh (3,0%), Karakalpak (2,5%), Tatar (1,5%), etnis pendatang atau blasteran (10%), dan etnis lain (2,5%).¹

Sama seperti etnis, bahasa yang digunakan di Uzbekistan juga bahasa mayoritas yakni bahasa Uzbek, juga bahasa Uzbek menjadi bahasa resmi yang diakui dan dipakai oleh Uzbekistan. Meskipun begitu, masih ada bahasa lain yang minoritas yang tetap dipakai penduduk Uzbekistan selain bahasa Uzbek. Adapun bahasa-bahasa yang ada di Uzbekistan adalah Uzbek (74,3%), Russian (14,2%), Tajik (4,4%), dan lain-lain seperti bahasa daerah (7,1%). Selain bahasa, agama di Uzbekistan secara mayoritas adalah Islam (sunni) dengan persentase sekitar 88% dari total penduduk. Sedangkan yang lain ada Kristen Ortodox yang memiliki persentase sekitar 9%. Diketahui Kristen Ortodox merupakan agama yang legal dan diakui oleh Rusia saat masih menjadi Uni Soviet, sehingga pengaruhnya menyebar ke seluruh wilayah Uni Soviet hingga Asia Tengah, termasuk Uzbekistan yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet.

¹ <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html>. CIA The World Factbook. "Uzbekistan". Diakses pada 15/11/2016

Negara Republik Uzbekistan kemudian diberikan kemerdekaan oleh Uni Soviet beberapa hari setelah Uni Soviet runtuh dari peristiwa Perang Dingin. Pemerintah Uzbekistan kemudian mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 1 September 1991. Hal itu kemudian menjadikan Hari Kemerdekaan Uzbekistan dirayakan setiap tanggal 1 September.

Semenjak mendeklarasikan kemerdekaan Uzbekistan, pemerintah Uzbekistan kemudian melakukan pemilihan umum pertama di tahun 1991. Pada tanggal 29 Desember 1991 Islam Karimov secara resmi terpilih sebagai Presiden Republik Uzbekistan. Karimov mengumumkan Konstitusi Uzbekistan di tahun 1992 untuk menggantikan konstitusi Uni Soviet yang sebelumnya dipakai sejak tahun 1924. Dari hasil konstitusi tersebut, secara resmi juga Uzbekistan merubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi sekuler yang mana sangat menjamin hak-hak asasi manusia.

1. Badan Eksekutif Uzbekistan

Karena memilih menjadi negara demokrasi, Uzbekistan melakukan pemilihan umum. Peraturan pemilihan umum presiden di Uzbekistan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Namun pada hasil Referendum yang dilakukan pada tahun 2002, masa jabatan presiden Uzbekistan diperpanjang menjadi 7 tahun dan maksimal masa jabatan presiden adalah tidak boleh lebih dari dua periode dengan pemimpin

yang sama. Dan di tahun 2011 konstitusi yang mengatur tentang durasi masa kepemimpinan tersebut dirubah kembali menjadi 5 tahun.²

Islam Karimov adalah salah satu presiden yang memimpin Uzbekistan sejak kemerdekaan Uzbekistan tahun 1991 sampai sekarang. Praktis Islam Karimov telah memimpin Uzbekistan selama 4 periode (1991-1996; 1996-2001; 2001-2008; dan 2008-2015). Lamanya kepemimpinan ini dikarenakan kuatnya imunitas politik yang ada dalam dirinya, salah satunya melalui pembuatan kebijakan atau keputusan presiden yang mana akan selalu menempatkan Islam Karimov di posisi yang paling menguntungkan.

Uzbekistan adalah negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Oleh karenanya Presiden memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam memilih perdana menteri. Presiden sebagai kepala negara memilih perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dan selanjutnya dari perdana menteri dibentuk sebuah kabinet yang akan terdiri dari menteri-menteri.

2. Badan Legislatif Uzbekistan

Berdasarkan Konstitusi yang dibuat tahun 1992, Uzbekistan memiliki badan legislatif yang menggunakan sistem satu kamar yang disebut sebagai Oliy Majlis (Majelis Tinggi). Oliy Majlis ini terdiri dari

² Rakhimov, Mirzhokid. Uzbekistan's Contemporary History and Foreign Affairs. *Himalayan and Central Asian Studies*. Vol. 19, Nos. 3-4, July-Dec 2015. Hlm. 118-120

250 anggota, dan masa jabatan anggota majelis ini sama seperti presiden, yakni setiap 5 tahun. Disini, Presiden memiliki wewenang untuk membentuk, merubah atau bahkan membubarkan Oliy Majlis.

Di tahun 2002, para anggota Majelis setuju untuk mengamandemen konstitusi dan pada akhirnya di dalam badan legislatif Uzbekistan berubah. Uzbekistan merubah Oliy Majlis dan membagi Oliy Majlis menjadi 2 kamar, yakni Majelis Tinggi (terdiri dari Senat) dan Majelis Rendah (terdiri dari Dewan Perwakilan).

Dalam Majelis Tinggi, senat-senat harus diambil dari beberapa wilayah atau provinsi yang ada di Uzbekistan sebagai perwakilan dalam Oliy Majlis, dan yang harus menduduki di kursi Majelis sebanyak 100 anggota. Sedangkan untuk Majelis Rendah, dewan-dewan adalah terdiri dari 150 anggota yang masuk dan sesuai kriteria berdasarkan kualifikasi yang ditentukan oleh Konstitusi Uzbekistan. Keduanya sama-sama dipilih melalui pemilihan umum yang dipilih langsung melalui rakyat.³

Untuk daerah Karakalpakstan, pemberian status republik kepada *Viloyati* ini adalah karena Rep. Karakalpakstan memiliki keistimewaan. Sehingga dalam pelaksanaannya daerah ini memiliki lembaga legislatif sendiri untuk mengatur konstitusi sendiri, namun pertanggungjawabannya tetap pada koridor undang-undang atau Konstitusi Uzbekistan yang masih berlaku.

³ <http://constitution.uz/en/clause/index>. Constitution of the Republic of Uzbekistan. Diakses pada 15/11/2016

3. Badan Yudikatif Uzbekistan

Sistem peradilan di yang ada di Uzbekistan terdiri 3, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Agung Republik Uzbekistan;
- 2) Mahkamah Konstitusi Republik Uzbekistan; dan
- 3) Mahkamah Agung Ekonomi Republik Uzbekistan.

Untuk Republik Karakalpakstan, provinsi ini memiliki otonomi khusus sehingga mereka memiliki badan yudikatif sendiri, yakni Pengadilan Tinggi Republik Karakalpakstan. Meskipun diberikan wewenang sendiri dalam menjalankan konstitusi dan hukumnya, namun fungsi dan tujuannya tetap sama seperti badan yudikatif yang ada di pemerintah pusat Republik Uzbekistan.

Masing masing mahkamah (*court*) memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Namun masih seperti halnya negara-negara yang lainnya, fungsi dan peran ini tidak jauh beda dalam halnya ranah badan yudikatif. Mahkamah Agung Republik Uzbekistan merupakan badan yang paling penting dalam menjalankan sistem proses hukum perdata, pidana dan administratif. Mahkamah Konstitusi adalah yang mengontrol pelaksanaan Konstitusi dan prinsip-prinsip hukum oleh semua cabang pemerintah, baik provinsi maupun pusat. Sedangkan yang beda sendiri adalah Mahkamah Agung Ekonomi Republik

Uzbekistan, adalah badan peradilan tertinggi yang mengatur tentang hubungan ekonomi dan aturan-aturan ekonomi dalam negara.⁴

B. Kebijakan Luar Negeri Uzbekistan

Dasar kebijakan atau politik luar negeri Uzbekistan tercantum di dalam Konstitusi Uzbekistan. Namun sebelum jauh masuk ke dalam bunyi pasal dan ayat, di dalam Preamble (pembukaan) Konstitusi Uzbekistan juga tersirat tentang sikap dan arah politik luar negeri Uzbekistan terhadap dunia internasional.

“...recognizing priority of the generally accepted norms of the international law, ...”⁵

Dari segi hubungan internasional, Uzbekistan telah menyatakan melalui pembukaan konstitusinya bahwa Uzbekistan sangat mengakui dan menghargai norma-norma prioritas yang secara umum telah disetujui oleh hukum internasional. Dalam hal ini, Uzbekistan telah melakukan dan mengaplikasikan norma-norma tersebut, yang kemudian langkah tersebut dianggap pemerintah Uzbekistan sebagai cara yang efektif agar Uzbekistan mendapatkan pengakuan secara internasional. Norma-norma tersebut antara lain seperti asas perdamaian, kebebasan sipil, hak asasi manusia, kerjasama internasional, keamanan internasional dan sebagainya.

⁴ <https://www.uzbekistan.org/uzbekistan/political/#government>. Diakses pada 15/11/2016

⁵ <http://constitution.uz/en/clause/index>. Constitution of Uzbekistan, Preamble. Alinea 6. Diakses pada 15/11/2016

Selain itu di dalam Konstitusi Uzbekistan juga telah diatur tentang politik dan kebijakan luar negeri Uzbekistan. Terdapat di Bab I (pertama) berjudul Prinsip Fundamental, pasal 4 Kebijakan Luar Negeri ayat 17. Bunyinya adalah sebagai berikut:

“The Republic of Uzbekistan shall have full rights in international relations. Its foreign policy shall be based on the principles of sovereign equality of states, non-use of force or threat of its use, inviolability of frontiers, peaceful settlement of disputes, non-interference in the internal affairs of other states and other universally recognized principles and norms of the international law.

The Republic may form alliances, join unions and other interstate organizations or withdraw from proceeding from the ultimate interests of the state and the people, their well-being and security.”⁶

Di dalam kutipan pasal 4 ayat 17 tersebut menyatakan bahwa Republik Uzbekistan sebagai negara yang merdeka harus memiliki hak penuh dalam hubungan internasional. Kebijakan luar negerinya harus didasarkan pada beberapa prinsip internasional, antara lain sebagai berikut

- a) persamaan kedaulatan negara;
- b) pengurangan kekuatan atau ancaman;
- c) permasalahan perbatasan;
- d) penyelesaian damai dalam sengketa;
- e) tidak campur tangan dalam urusan internal negara lain, dan;

⁶ <http://constitution.uz/en/clause/index>. Constitution of the Republic of Uzbekistan. Diakses pada 16/11/2016

f) mengikuti prinsip dan norma yang diakui secara universal serta di dalam hukum internasional.

Kemudian dalam ayat tersebut juga menyatakan bahwa Republik sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Uzbekistan juga dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) membentuk aliansi baru;
- b) bergabung dengan serikat atau organisasi internasional lain, dan bahkan;
- c) menarik diri dari suatu forum persidangan.

Dianggap kontroversi ataupun apresiasi, hal-hal tersebut tetap akan dilakukan Uzbekistan, karena kepentingan utama dalam pelaksanaan politik luar negeri Uzbekistan adalah mengutamakan keamanan negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Kebijakan politik luar negeri Republik Uzbekistan didasarkan pada konstitusi, hukum dan tindakan hukum normatif lainnya yang diatur oleh negara. Namun untuk sikap ataupun respon dari politik luar negeri Uzbekistan tentang suatu isu ataupun peristiwa yang terbaru bisa dilihat dari laporan Kementerian Luar Negeri dan pidato Presiden Uzbekistan. Untungnya, semua hal yang berkaitan dengan politik luar negeri Uzbekistan telah diakui dalam konvensi internasional dan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh negara.

1. Tujuan Kebijakan Luar Negeri Uzbekistan

Secara umum tujuan utama dari kebijakan luar negeri Republik Uzbekistan adalah penguatan lebih lanjut sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, juga negara yang mendukung penuh asas-asas internasional. Dan dengan pertimbangan tersebut, terciptalah tujuan kebijakan luar negeri Republik Uzbekistan yang mana terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut:

- a) upaya konsistensi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat,
- b) peningkatan peran dan posisi negara dalam politik internasional,
- c) penciptaan kondisi yang paling ideal untuk menjaga keamanan nasional dan regional,
- d) perkembangan perekonomian nasional yang berkelanjutan,
- e) penggalakan gerakan progresif untuk menciptakan sebuah negara demokrasi yang terbuka di sekitar kawasannya, dan
- f) bekerjasama dengan jajaran negara-negara maju di dunia.

2. Karakteristik Kebijakan Luar Negeri Uzbekistan

Sesuai dengan Konsep Kebijakan Luar Negeri yang telah diatur jauh sejak kemerdekaan, Republik Uzbekistan telah menyatakan bahwa mereka bebas untuk berhak untuk masuk atau tidak masuk ke dalam suatu aliansi, bergabung dengan persemakmuran dan formasi organisasi

regional lainnya, serta meninggalkan suatu organisasi atau aliansi yang berbau kepentingan sepihak. Namun dalam hal lain Uzbekistan justru mendukung penuh kebijakan yang mengarah kepada kesejahteraan dan keamanan negara, juga berprioritas pada arah modernisasi negara.

Dalam segi keamanan dan militer, Uzbekistan melakukan kebijakan damai dan tidak sembarangan berpartisipasi dalam blok-blok militer-politik yang ada di Asia Tengah atau sekitar persemakmuran Rusia. Dan Uzbekistan juga harus meninggalkan formasi atau aliansi beberapa negara jika perkembangannya di dalamnya menjadi blok militer-politik untuk memusuhi blok lain.

Republik Uzbekistan mengambil langkah-langkah kerjasama politik, ekonomi dan yang lainnya demi mencegah negaranya terlibat dalam konflik-konflik militer dan masuk ke dalam sarang-sarang ketegangan di negara-negara tetangga. Secara tegas, Uzbekistan juga tidak akan mungkin memberikan izin pendirian pangkalan militer asing oleh negara lain di wilayahnya sendiri, baik itu di daratan atau di lautan, dikarenakan alasan keamanan nasional dan prinsip.

Sesuai dengan undang-undang atau Konstitusi Uzbekistan yang ada pada Bab 6 “Kewenangan Organisasi Negara”, pasal 26 “Pertahanan dan Keamanan”, ayat 125 dan 126, disana mengatur tentang sikap militer sebagai pelaksana keamanan nasional. Bahwasannya Angkatan Bersenjata Republik Uzbekistan diciptakan khusus untuk melakukan perlindungan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara,

menciptakan kehidupan yang aman dan damai bagi penduduknya, dan tidak sebagai alat juga diperalat dalam kegiatan operasi perdamaian ataupun operasi militer di luar negeri.

3. Uzbekistan Dan Kebijakan Luar Negeri yang Modern

Uzbekistan telah melakukan kebijakan luar negeri secara komprehensif dan seimbang yang didasarkan pada kepentingan nasional. Oleh karenanya, Republik Uzbekistan memperoleh pengakuan luas dari organisasi internasional dan masyarakat dunia sebagai negara yang taat pada kaidah norma dan hukum internasional.

Kebijakan luar negeri Uzbekistan yang aktual atau modern saat ini dibentuk dengan mempertimbangkan realitas politik internasional yang mana di abad ke-21 ini banyak isu-isu yang dinamis dan selalu berubah-ubah. Hal ini menuntut Uzbekistan untuk turut bersikap aktif terlibat dalam kegiatan internasional, bersikap inisiatif dalam situasi yang mendesak, dan bersikap pragmatis dalam hal realitas keadaan yang memaksa negara berpikir secara rasional.

Banyak sebagian negara yang mengubah kebijakannya dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi yang terus berjalan dan berubah. Termasuk juga negara Uzbekistan. Dalam rangka mendukung politik luar negeri yang sesuai dengan perkembangan isu-isu terkini, Uzbekistan telah mencanangkan kebijakan luar negeri yang dirasa relevan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Tugas Kementerian

Luar Negeri dalam menjalankan kebijakan luar negeri Uzbekistan di zaman modern abad ke-21 ini antara lain sebagai berikut:

Pengembangan yang konsisten dari kerjasama internasional

Kerjasama tersebut bisa termasuk politik, ekonomi-perdagangan, kemanusiaan, budaya, ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang lainnya;

Membentuk kondisi kebijakan luar negeri yang paling menguntungkan

Yakni dengan pelaksanaan efektif dari sebuah hubungan luar negeri dan memberikan pengaruh positif demokrasi di suatu negara.

Melestarikan perdamaian dan memperkuat stabilitas ekonomi-politik di Asia Tengah

Tujuan tersebut ditempuh dengan cara mengubah suatu daerah menjadi zona keamanan dan pembangunan berkelanjutan dan juga membantu pencapaian perdamaian dan stabilitas keamanan-politik di Afghanistan;

Membentuk sistem yang seimbang dan multidimensi dalam kerjasama internasional

Hal ini terdiri dari menciptakan kemitraan strategis dengan negara-negara terkemuka dunia dan organisasi internasional, menjaga keseimbangan geopolitik di suatu kawasan, melakukan perluasan jaringan yakni:

- 1) perdagangan;
- 2) ekonomi;
- 3) teknologi;
- 4) transportasi, dan yang lainnya yang dimiliki Uzbekistan.

Menggunakan mekanisme hukum politik, hukum diplomatik dan hukum internasional

Termasuk langkah-langkah diplomasi preventif untuk penyelesaian secara cepat dan tepat dari suatu permasalahan yang ada atau muncul di daerah;

Mempromosikan citra internasional Republik Uzbekistan

Bahwa Uzbekistan adalah mitra politik dan ekonomi yang handal, iklim investasi dalam negeri yang aman, pariwisatanya yang unik, daya tarik budaya dan sejarah bangsanya layak dikenalkan ke dalam arena internasional;

Pengembangan kerjasama secara aktif dan penggunaan mekanisme kerjasama melalui jalur bilateral dan multilateral.

Untuk mempromosikan daya tarik investasi asing langsung dan teknologi yang tinggi demi peningkatan sektor-sektor ekonomi nasional;

Mempromosikan pembentukan dan pengembangan sistem pelayanan

Terutama bagi warga asing, yang mana akan melayani dan memandu transportasi-komunikasi internasional dari dan ke Uzbekistan, dan sekaligus juga menyediakan akses yang handal dan cepat untuk memfasilitasi Uzbekistan bersaing ke level global;

Memastikan perlindungan Warga Negara Uzbekistan di luar negeri

Negara harus menjaga secara komprehensif atas hak-hak dan kepentingan warga negara Uzbekistan yang berada di luar negeri. Juga perlindungan atas badan hukum atau organisasi resmi Republik Uzbekistan yang berada di luar negeri.

4. Proses Pengambilan Keputusan Negara Uzbekistan

Uzbekistan merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan yang cukup kuat di antara negara-negara Asia Tengah lainnya. Ini dikarenakan pengambilan keputusan di Uzbekistan terjadi secara cepat dan tegas. Dalam mengambil keputusan tersebut, Uzbekistan dipengaruhi oleh beberapa elemen atau unsur dominan yang terdapat di dalam negaranya, sehingga pengambilan keputusan di Uzbekistan mengacu pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

a. Presiden

Faktor ini sangat besar mengingat pada umumnya peran Presiden memang sebagai pengambil keputusan tertinggi. Namun disamping itu semenjak Islam Karimov dipilih sebagai

presiden, peran beliau dalam pembuatan kebijakan luar dan dalam negeri Uzbekistan sangatlah besar. Selama periode kepemimpinannya, lebih dari 2 kali beliau berani merubah kebijakan yang berkaitan dengan badan eksekutif dan legislatif Uzbekistan. Tekad yang bulat dan percaya diri atas keputusannya adalah sikap yang dimiliki Islam Karimov, sehingga tidak heran bila Karimov menganggap dirinya lebih unggul daripada pemimpin negara yang lainnya.⁷

b. Peran Ideologi (Arah Politik Uzbekistan)

Ideologi yang pernah dipakai oleh Uzbekistan yakni komunis-sosialis yang mulanya merupakan satu gagasan dengan Rusia. Titik awalnya berada pada runtuhnya Uni Soviet, dan masa tersebut dikenal dengan “de-ideologization” sehingga Uzbekistan Uni Soviet keluar dari keanggotaan, menyatakan kemerdekaan, dan yang paling penting adalah membuat konsep ideologi yang sesuai dengan jiwa dan kultur Uzbekistan. Peran ideologi sedikit demi sedikit membangun arah politik bangsa Uzbekistan. Intinya, bagi Uzbekistan peran ideologi ini adalah menjauhkan diri dari pengaruh Uni Soviet beserta dengan gagasan-gagasan lamanya.

c. Lingkungan Eksternal

⁷ International Area Review. Volume 13, Number 2, Summer 2010. The Non-Institutional Factors of Foreign Policy Decision-Making in Uzbekistan. Lee, Ji-Eun. Hankuk University of Foreign Studies

Letak geografis negara yang sangat strategis membuat Uzbekistan selalu diminati oleh negara-negara lain yang berada di Eurasia. Ketertarikan negara lain tersebut bisa menimbulkan keuntungan dalam beberapa hal, seperti kerjasama politik, ekonomi dan militer. Kondisi yang demikian sangat mempengaruhi keputusan luar negeri. Namun kelemahannya adalah isu-isu global selalu berkembang, sehingga kebijakan luar negeri yang dibuat Uzbekistan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi internasional yang terjadi pada saat itu.

Pengambilan keputusan yang terjadi di Uzbekistan adalah pengambilan keputusan yang formal, artinya yang melakukan decision-making hanyalah lembaga yang berada di pemerintahan di dalam negara seperti Eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri-menteri) dan Legislatif (Dewan Perwakilan atau Senat).⁸

Menurut Undang-undang Aturan Majelis Tinggi (Senat) Oliy Majlis Republik Uzbekistan dan Aturan Majelis Rendah (Dewan Perwakilan) Oliy Majlis Republik Uzbekistan, kedua majelis ini (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah) mempunyai wewenang untuk membangun dan mengembangkan hubungan internasional dengan parlemen negara-negara lainnya. Perundang-undangan ini tidak

⁸ <http://senat.uz/en/senate-slrp/index.html>. The Senate of The Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. The Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan as a supreme legislative body of regional representation. Diakses pada 5/5/2017

membedakan antara kekuasaan ruang Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Oleh karena itu, mereka bisa juga bekerja sama dalam hal urusan perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang mengatur kebijakan luar negeri dengan negara ataupun organisasi lain juga memerlukan keterlibatan kedua majelis tersebut. Perjanjian tersebut kemudian diputuskan dalam suatu sidang bersamaan dengan Presiden, dan hasilnya hanya ada dua keputusan: meratifikasi atau membatalkan.⁹

Senator Oliy Majlis adalah satu-satunya kekuatan untuk mengkoordinasikan segala aktivitas kebijakan luar negeri. Secara khusus, berdasarkan Pasal 80 Konstitusi Uzbekistan, para Senat Oliy Majlis menunjuk dan menolak perwakilan diplomatik dan perwakilan Uzbekistan lainnya di negara-negara lain dengan keputusan Presiden Uzbekistan. Selain itu, ada bagian dari Bab Konstitusi yang menentukan hak eksklusif Senat untuk mengadopsi sebuah resolusi yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan politik, sosial dan ekonomi serta kebijakan domestik dan luar negeri negara lain.

C. Partisipasi Uzbekistan Dalam Organisasi Internasional

Uzbekistan merupakan salah satu negara yang tergabung dalam CIS (Commonwealth of Independent States) bersama dengan 10 negara lainnya.

Selain CIS, sebagai negara yang menghormati aturan dan norma

⁹ <http://senat.uz/en/organization-and-the-rules/interparliamentary-and-international-cooperation.html>. The Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Organization and the Rules of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Interparliamentary and international cooperation. Diakses pada 4/5/2017

internasional, Uzbekistan juga turut memberikan partisipasinya sebagai anggota dari beberapa organisasi regional dan internasional, antara lain sebagai berikut:

1. UN (United Nations)

Suatu negara yang merdeka dan berdaulat memang seharusnya bergabung dengan UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai lembaga supranasional tertinggi di dunia, agar mendapatkan pengakuan secara internasional dalam berbagai bidang. Maka dari itu Uzbekistan telah bergabung dengan UN, yang secara aktif telah terdaftar sebagai anggota aktif pada tanggal 02 Maret 1992.

Misi utama Uzbekistan bergabung dalam UN dari dulu hingga sekarang adalah peningkatan stabilisasi kawasan dan keamanan nasional. Uzbekistan ingin mendapatkan posisi yang paling menguntungkan dalam politik luar negeri, dan keamanan nasional begitu penting mengingat ancaman berupa terorisme dan gerakan radikal sangat marak menjelang abad ke-21 ini.

Kemudian di dalam UN, terbagi menjadi 3 cabang organisasi program antara lain:

- a) Program dan Pendanaan. Disini lebih ditekankan pada bantuan program dan dana kepada negara-negara anggota.

- b) Badan Spesial UN. Disini merupakan sekumpulan beberapa organisasi khusus yang memiliki wewenang tersendiri di dalam suatu bidang kajian tertentu.
- c) Entitas Lain UN. Disini adalah beberapa organisasi yang memiliki program kerja dan ranah tersendiri namun masih terdapat kedekatan dengan UN.

UN Berdiri: 26 Juni 1945 (menurut UN Charter) – Kantor: New York, Amerika Serikat.

a. Program dan Pendanaan

1) UNDP (United Nations Development Programme)

Sebagai negara berkembang, Uzbekistan harus melaksanakan program jangka panjang untuk mengembangkan kualitas SDM di negaranya. Dan sebagai wujudnya, Uzbekistan telah bekerjasama dengan UNDP pada tanggal 10 Juli 1993. Tujuan Uzbekistan bekerjasama adalah untuk pencapaian dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di Uzbekistan.

UNDP Berdiri: sekitar 1965 – Kantor: New York, Amerika Serikat.

2) UNFPA (United Nations Population Fund)

Uzbekistan adalah negara dengan penduduk terbesar se-Asia Tengah. Untuk menjaga populasi agar tetap baik dan ideal, maka UNFPA adalah program yang cocok bagi Uzbekistan. Uzbekistan telah bekerjasama dengan UNFPA sekitar tahun 1993. Dan tujuan Uzbekistan bekerjasama dengan program ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kesehatan yang menyangkut tentang reproduksi, kelahiran dan statistik populasi manusia di Uzbekistan.

UNFPA Berdiri: sekitar 1969 – Kantor: New York, Amerika Serikat.

3) UNICEF (United Nations Children's Fund)

Faktor kebahagiaan anak-anak adalah salah satu kunci keberhasilan generasi bangsa. Oleh karenanya Uzbekistan melakukan kerjasama dengan UNICEF sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak. Perjanjian dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1995. Tujuan Uzbekistan bekerjasama dengan program ini adalah untuk mengembangkan kualitas dan kesejahteraan ibu dan anak di negara Uzbekistan.

UNICEF Berdiri: 11 Desember 1946 – Kantor: New York, Amerika Serikat.

4) UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

Banyaknya aktivitas narkoba di daerah perbatasan Uzbekistan menyebabkan Uzbekistan harus melakukan tindakan, salah satunya bekerjasama dengan UNODC yang telah dilaksanakan pada tahun 1998. Tujuannya adalah agar meningkatkan *awareness* terhadap pengawasan dan pemberantasan narkoba di Uzbekistan

UNODC Berdiri: tahun 1997 – Kantor: Wina, Austria.

b. Badan Spesial UN

1) IMF (International Monetary Fund)

Kondisi ekonomi yang masih lemah pasca memerdekakan diri dari Uni Soviet adalah salah satu faktor penghambat Uzbekistan dalam mewujudkan tujuan nasional sebagai negara yang adidaya. Oleh karena itu Uzbekistan bergabung dengan IMF untuk mendapatkan pinjaman dana demi memperbaiki kestabilan ekonomi. Perjanjian telah diratifikasi pada 21 September 1992.

IMF Berdiri: 27 Desember 1945 – Kantor: Washington D.C., Amerika Serikat.

2) WB (World Bank)

Sama halnya seperti bergabung dengan IMF, tujuan Uzbekistan bergabung dengan WB adalah untuk memperbaiki dan membantu sistem tatakelola ekonomi, namun WB ini lebih fokus pada bidang perbankan. Perjanjian dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1992.

WB Berdiri: 27 Desember 1945 – Kantor: Washington D.C., Amerika Serikat.

3) WHO (World Health Organization)

Kesehatan adalah aset utama warganegara, terlebih bagi negara yang sedang berkembang. Dan karenanya Uzbekistan bergabung dengan WHO, dengan tujuan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas kesehatan Uzbekistan. Negara ini telah bergabung dan bekerjasama dengan WHO pada 25 Mei 1992.

WHO Berdiri: 07 April 1948 – Kantor: Jenewa, Swiss.

4) UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Sebagai negara yang memiliki warisan sejarah dan budaya etnis Uzbek, negara Uzbekistan turut menjaga melalui keikutsertaannya dalam UNESCO. Tujuannya adalah untuk

melindungi warisan sejarah, budaya, dan ilmu-ilmu yang telah bermanfaat bagi Uzbekistan dan dunia. Dan Uzbekistan bergabung pada tanggal 26 Oktober 1993.

UNESCO Berdiri: 16 November 1945 – Kantor: Paris, Perancis.

5) [FAO \(Food and Agricultural Organization\)](#)

Riwayat masa lalu Uzbekistan adalah sebagai penghasil kapas terbesar bagi Uni Soviet. Namun kini, Uzbekistan lebih berfokus pada hasil pertanian non-kapas. Agar Uzbekistan dapat melakukan diversifikasi hasil pertanian, Uzbekistan bergabung dengan FAO pada tanggal 02 Oktober 2001. Tujuan Uzbekistan bekerjasama dengan FAO adalah untuk mengembangkan hasil sektor pertanian sebagai bahan pokok makanan.

FAO Berdiri: 16 Oktober 1945 – Kantor: Roma, Italia.

6) [WIPO \(World Intellectual Property Organization\)](#)

Uzbekistan adalah negara yang sangat kaya dalam seni dan sejarah budaya. Dalam rangka mengurangi plagiarisme dan pengakuan oleh bangsa lain, maka Uzbekistan bergabung dengan WIPO, yang telah dilakukan sekitar tahun 1991. Adanya Uzbekistan bekerjasama dengan WIPO adalah sebagai bentuk dukungan dalam pelegalan hak kekayaan intelektual dan hak karya cipta dalam skala internasional.

WIPO Berdiri: 14 Juli 1967 – Kantor: Jenewa, Swiss.

2. EAPC/PfP (Euro-Atlantic Partnership Council/Partnership for Peace)

Perdamaian bagi Uzbekistan adalah harga mati, karena perdamaian akan membawa suasana yang kondusif bagi politik luar dan dalam negeri. Demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam penciptaan keamanan kawasan di sekitar Eropa dan lautan Atlantik, Uzbekistan bergabung dengan EAPC/PfP.

Sebelumnya Uzbekistan telah melakukan hubungan bilateral secara resmi dengan NATO pada 21 Desember 1991, dimana pada saat itu Uzbekistan memang membutuhkan aliansi guna menambah relasi selepas dari Uni Soviet. Kemudian kerjasama antara Uzbekistan dengan EAPC/PfP dilaksanakan sekitar Juli 1994.

Tujuan dibentuknya EAPC/PfP ini adalah sebagai peningkatan dan penguatan hubungan diplomatik antara negara NATO dan non-NATO di sekitar kawasan Eropa dan Atlantik. Misi ini bukanlah sebagai penguatan pengaruh NATO, meskipun kenyataannya organisasi ini memang murni dibentuk oleh NATO.

EAPC/PfP Berdiri: sekitar tahun 1991. Kantor: Brussel, Belgia (satu kantor dengan NATO).

3. ADB (Asian Development Bank)

Tujuan didirikannya ADB adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Sistemnya seperti halnya IMF dan WB, yang membuat berbeda hanya pada kawasannya saja. Namun yang sedikit menarik adalah persyaratan ADB tidak serumit persyaratan yang ditawarkan IMF dan WB, sehingga dalam hal ini Uzbekistan secara mudah bisa mendapatkan pinjaman ataupun dana sebagai modal pembangunan bagi negaranya.

Setelah melalui berbagai proses, Uzbekistan kemudian melakukan kerjasama dengan ADB sekitar Agustus 1995. Fokus kerjasama dengan ADB meliputi 4 sektor, yakni pertanian, privatisasi industri, pembangunan transportasi dan proyek sosial. Keempat kerjasama tersebut berjalan hampir 15 tahun dan menjadikan Uzbekistan sebagai top-15 negara-negara pemegang saham terbesar dan top-14 peminjam dana terbesar.

ADB Berdiri: 19 Desember 1966 – Kantor: Manila, Filipina.

4. SCO (Shanghai Cooperation Organization)

Sebelum Uzbekistan bergabung, SCO mulanya bernama *Shanghai Five* yang terdiri dari Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan dan Tajikistan. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk kerjasama dalam bidang keamanan kawasan, ekonomi dan kebudayaan.

Uzbekistan kemudian bergabung dengan organisasi ini pada 15 Juni 2001, yang secara implikatif mengubah nama yang sebelumnya Shanghai Five menjadi SCO.

SCO ini merupakan kerjasama kawasan regional yang terbesar di dunia, dimana anggotanya adalah Rusia dan Tiongkok yang mana kedua negara ini memiliki luas wilayah yang sangat besar dan penduduk yang sangat banyak.

Tentu hal ini sangat memberi keresahan yang besar bagi Amerika Serikat jika kedua negara tersebut bersatu. Dan benar saja, pada tahun 2005 Amerika Serikat mencoba bergabung kedalam SCO namun oleh negara-negara anggota SCO ditolak dengan alasan Amerika Serikat adalah kawasan yang jauh. Lebih dari itu, SCO tidak menerima negara yang menempatkan pasukan militer di daerah perbatasan negara lain. Amerika Serikat pada saat itu memiliki pangkalan militer di daerah Uzbekistan (Karshi-Khanabad Air Base) dalam rangka misi perang melawan Irak dan Afghanistan.

SCO Berdiri: 26 April 1996 – Kantor: Beijing, Tiongkok.

